

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA

Mohammad Bhakti Setiawan & Abdul Hakim

Universitas Islam Indonesia

tk_ajib@yahoo.com

Abstrak: Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Paper ini memodelkan perilaku Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel-variabel independen yang dipertimbangkan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), Pajak Pendapatan (PPN), variabel dummy desentralisasi pemerintahan, variabel dummy krisis tahun 1997, dan variabel dummy krisis tahun 2008. Dengan menggunakan Error Correction Model (ECM), paper ini menemukan bahwa PDB dan PPN berpengaruh terhadap IPM dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Estimasi model ECM menemukan bahwa krisis ekonomi tahun 2008 berpengaruh terhadap IPM, sementara krisis tahun 1997 dan desentralisasi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap IPM.

Kata kunci: IPM, desentralisasi pemerintahan, produk domestik bruto, pajak pendapatan, ECM

Abstract: Human Development Index of Indonesia. This paper models the behavior of Human Development Index (HDI). Independent variables included in the model are Gross Domestic Product (GDP), Income Tax (PPN), a dummy variable on government decentralization, a dummy variable on the 1997 economic crisis, and a dummy variable on the 2008 crisis. The paper finds that GDP and PPN significantly influence IPM both in the short run and in the long run. The Error Correction Model (ECM) estimation finds that the crises of 2008 influences IPM, while the crises in 1997 and government decentralization do not influence HDI.

Key words: Human Development Index, government decentralization, gross domestic product, income tax, ECM

PENDAHULUAN

Perdebatan tentang indikator pembangunan sosial-ekonomi sudah sejak lama terjadi. Pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan telah digugat oleh kalangan ekonomi maupun non-ekonomi yang melihat ketidakakuratan indikator tersebut, yang kemudian memunculkan beberapa indikator baru. Indikator baru secara umum berfokus pada pembangunan manusia. Morris (1979) membangun *the Physical Quality of Life Index (PQLI)*, sedangkan United Nation Development Program (UNDP) membangun Human Development Index (HDI)

atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan landasan yang dibangun oleh Haq (1996).

Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui *Human Development Report* tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi ini pembangunan manusia didefinisikan sebagai "*a process of enlarging people's choices*" atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hi-

dup yang layak. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Kondisi perekonomian Indonesia cukup menjanjikan pada awal dekade 1980-an sampai pertengahan dekade 1990-an. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik berbagai tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak awal tahun 1986 sampai tahun 1989 terus mengalami peningkatan, yakni sekitar 6.8% per tahun. Pertumbuhan sedikit melambat menjadi 7% di tahun 1990 dan 1991. Kemudian tahun 1992 – 1997 secara mengalami perlambatan dari 6,2% menjadi 4.7%. Tahun 1998 pertumbuhan ekonomi menjadi negatif sebesar -13,13% disebabkan krisis moneter yang melanda Indonesia dan beberapa negara-negara Asia. Tahun-tahun berikutnya perekonomian Indonesia perlahan bangkit menunjukkan perbaikan. Mengingat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan *PDB*, maka model ini akan memperhitungkan *PDB* dalam menjelaskan perilaku *IPM*.

Pada akhir dekade 1990-an Indonesia memulai desentralisasi pembangunan Indonesia, ditandai dengan pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, proses desentralisasi dan otonomi daerah merupakan prioritas. Hal ini diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan, mendorong kerja sa-

ma antar pemerintah daerah, menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien, meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah, meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta menata daerah otonom baru.

Gejala ikutan dari fenomena di atas adalah pemekaran daerah yang kemudian diatur dalam PP No. 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Pemekaran daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pasal 2 PP No. 129 Tahun 2000) yang disebabkan oleh berbagai hal. Pertama, pemekaran mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat. Kedua, pemekaran daerah dihipotesiskan mampu memperbaiki pemerataan pembangunan. Ketiga, pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil (Nuraini, 2005).

Selain desentralisasi dan *PDB* yang diduga akan meningkatkan *IPM*, terdapat variabel yang diduga akan menurunkan *IPM*, yakni peningkatan pajak pemerintah. Pajak ini akan mengurangi disposable income masyarakat sehingga diduga akan menurunkan *IPM*.

Sejak tahun 1990 sampai dengan 1995 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia umumnya mengalami peningkatan. Penurunan pernah terjadi yakni pada tahun 1996 dan 1998. Dan meningkat kembali mulai sejak tahun 1999 hingga 2005, kemudian pada tahun 2006 terjadi sedikit penurunan dan pada tahun 2007 *IPM* Indonesia meningkat

kembali. Penurunan juga terjadi pada tahun 2008, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2009 dan mengalami penurunan pada tahun 2010.

Tabel 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia

Tahun	IPM	Tahun	IPM
1990	0,499	2001	0,682
1991	0,515	2002	0,692
1992	0,637	2003	0,697
1993	0,641	2004	0,711
1994	0,668	2005	0,728
1995	0,679	2006	0,726
1996	0,643	2007	0,731
1997	0,681	2008	0,711
1998	0,67	2009	0,717
1999	0,677	2010	0,613
2000	0,684		

Sumber: BPS, berbagai tahun

Dari fakta di atas, penulis menduga bahwa penurunan *IPM* pada tahun 2008 dipicu oleh krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997. Peningkatan *IPM* dari tahun 1999 dari 2005 diduga dipengaruhi oleh desentralisasi pemerintahan yang dimulai tahun 2009. Penurunan *IPM* pada tahun 2008 diduga dipengaruhi oleh krisis yang bermula dari perekonomian Amerika tahun 2008. Berbagai variabel tersebut akan digunakan untuk menjelaskan perilaku *IPM*.

Indeks Pembangunan Manusia (*IPM*) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan

dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dan sebagainya. Empat hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pembangunan manusia adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995: 12). Titik berat pembangunan nasional Indonesia sesungguhnya sudah menganut konsep tersebut, yakni konsep pembangunan manusia seutuhnya yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun spiritual. *IPM* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM = (Index X_1 + Index X_2 + Index X_3) / 3$$

Keterangan:

X_1 = lama hidup, X_2 = tingkat pendidikan, dan X_3 = tingkat kehidupan yang layak.

Desentralisasi dalam ilmu administrasi publik dijelaskan sebagai sebuah pendekatan dan teknik manajemen yang berkenaan dengan fenomena tentang pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari sebuah tingkat pemerintahan kepada tingkat yang lebih rendah. Dalam *the 6th Global Forum* tahun 2005 dinyatakan bahwa desentralisasi merupakan solusi yang baik dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis (Setiyono, 2004: 205, Alm dkk., 2001). Berbagai keuntungan desentralisasi dibahas dalam Rondinelli dan Cheema (1983), Syaukani dan Rasyid (2001), Fisman dan Gatti (2002), Es-

tache dan Sinha (1995), Davoodi dan Zou (1998), De Mello (2000), Devas dan Grant (2003), serta Martinez-Vazquez dan McNab (2003). Dengan desentralisasi, diharapkan pembangunan lebih berhasil, sehingga salah satu indikator pembangunan, yakni *IPM*, dihipotesiskan akan meningkat.

Jumlah barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara dapat diartikan sebagai nilai dari Produk Domestik Bruto (*PDB*). *PDB* berkaitan erat dengan *IPM*. Bahkan boleh dikatakan bahwa *IPM* merupakan pengukur kesejahteraan yang disempurnakan, sementara *PDB* adalah pengukur kesejahteraan yang lama. Namun demikian, dua pengukur tersebut tidak harus selalu berjalan linier, karena peningkatan *PDB* tanpa disertai peningkatan pemerataan pendapatan dan alokasi atas aktivitas yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga tidak akan meningkatkan *IPM*. Dalam memodelkan pengaruh desentralisasi terhadap *IPM*, variabel *PDB* bisa dianggap sebagai sebuah variabel kontrol.

Pajak yang dikumpulkan pemerintah merupakan pendapatan pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluarannya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut akan merupakan pembiayaan atas aktivitas yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga peningkatan pajak yang diterima pemerintah berpotensi meningkatkan *IPM*. Namun harus dicatat bahwa pajak yang dipungut pemerintah akan mengurangi *disposable income* masyarakat sehingga berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat, dan dengan demikian akan menurunkan

IPM. Penelitian empiris ini bermaksud mengungkap arah hubungan tersebut.

Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 merupakan krisis berkepanjangan yang diduga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini memasukkan variabel dummy krisis ke dalam model yang dibangun untuk memodelkan perilaku *IPM*.

Berbagai teori tentang kemungkinan dampak desentralisasi atas *IPM* dibahas oleh Scott (2006) dan Brassard (2008). Dari segi empiris, Patta (2012) menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Dia menemukan bahwa variabel-variabel yang berpengaruh terhadap *IPM* adalah pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, dan ketimpangan distribusi pendapatan.

Brata (2005) menguji bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah khususnya bidang pendidikan dan kesehatan (*IPP*), investasi swasta (*IS*) dan distribusi pendapatan proksi indeks Gini (*IG*) terhadap indeks pembangunan manusia (*IPM*) dalam konteks regional (antar provinsi) di Indonesia. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Semakin besar alokasi penge-

Tabel 2. Unit Root Test, In-level dan In-First Difference

No	Variabel	t-stat	t-kritis			Prob
			1%	5%	10%	
1	IPM – in level	-1,598	-4,498	-3,658	-3,269	0,757
2	PDB – in level	-0,549	-4,498	-3,658	-3,269	0,971
3	PPN – in level	2,266	-4,668	-3,733	-3,310	1,000
4	IPM – first difference	-4,884	-4,533	-3,674	-3,277	0,005
5	PDB – first difference	-2,932	-3,832	-3,030	-2,655	0,060
6	PPN – first difference	-4,140	-4,668	-3,733	-3,310	0,025

luaran bidang pendidikan dan kesehatan semakin baik pula *IPM* dicapai. Variabel investasi swasta berpengaruh negatif terhadap *IPM*. Hal ini dimungkinkan karena karakteristik investasi swasta tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Variabel *IG* berpengaruh positif terhadap *IPM*, artinya semakin merata distribusi pendapatan semakin baik pula pembangunan manusia. Variabel lag *IG* menunjukkan pengaruh negatif yang berarti pada jangka panjang akan semakin sulit meningkatkan kualitas SDM melalui distribusi pendapatan.

Ginting (2008) menganalisis pengaruh konsumsi rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, rasio penduduk miskin dan krisis ekonomi terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara konsumsi rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, rasio penduduk miskin dan krisis ekonomi terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Variabel dummy krisis ekonomi menunjukkan pengaruh negatif.

Di antara paper-paper yang menganalisis *IPM*, sangat sedikit yang menyelidiki pengaruh desentralisasi terhadap *IPM*, terutama untuk kasus Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk mengisi gap tersebut.

METODE

Penelitian ini menganalisis perilaku Indeks Pembangunan Manusia (*IPM*). Variabel penjelas yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (*PDB*), Pajak Pendapatan (*PPN*), Dummy Desentralisasi (*DD*), dan Dummy Krisis Ekonomi (*DK*). Data-data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai sumber data, yakni buku laporan, dokumen, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan judul penelitian dari Badan Pusat Statistik.

Mengingat data *time series* berpotensi *non-stasioner*, maka penelitian ini berencana menggunakan Model Koreksi Kesalahan (*Error Correction Model* atau *ECM*). Untuk keperluan ini, langkah pertama yang akan dilakukan adalah melakukan uji stasioneritas dengan uji akar unit. Beberapa uji akar unit tersedia dalam literatur, di antaranya adalah uji Dickey-Fuller (*DF test*), uji Augmented Dickey-Fuller (*ADF test*), dan uji Phillipps-Perron (*PP test*). Penelitian ini akan

Tabel 3. Uji Kointegrasi

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.791351	49.01997	29.79707	0.0001
At most 1 *	0.634531	19.24501	15.49471	0.0130
At most 2	0.006302	0.120124	3.841466	0.7289

menggunakan uji ADF karena uji ini mampu mendeteksi berbagai kemungkinan seperti variasi jumlah lag maupun keberadaan *intercept* maupun *trend* (Dickey & Fuller, 1979; Phillips & Perron, 1988)

Jika data terbukti tidak stasioner dalam data asli (*in-level*), maka uji stasioner dilanjutkan dengan uji dalam tingkat beda (*in-difference*). Uji ini dilakukan untuk mengetahui pada beda (*difference*) berapakah (atau pada derajat integrasi berapakah) data-data tersebut stasioner. Jika semua data memiliki derajat integrasi yang sama, maka bisa dilakukan uji kointegrasi untuk mengetahui keberadaan keseimbangan jangka panjang di antara variabel-variabel yang diteliti. Jika terbukti bahwa variabel-variabel tersebut berkointegrasi, maka ECM bisa diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menguji stasioneritas data, dilakukan uji akar unit, baik *in-level* maupun *in-first difference*. Hasil pengujian ditemukan bahwa tiga variabel non dummy yang dianalisis, yakni *IPM*, *PDB* dan *PPN* tidak stasioner (bisa dilihat dari nilai probabilitas yang lebih dari 5%). Uji akar unit atas tiga variabel tersebut *in-first difference* menunjukkan bahwa

mereka stasioner, meskipun *PDB* stasioner hanya pada tingkat 6% (Tabel 2).

Setelah tiga variabel tersebut terbukti terintegrasi pada derajat yang sama, dalam hal ini pada *first-difference* (atau *I(0)*), maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi.

Dari hasil uji kointegrasi (Tabel 3) ditemukan bukti adanya kointegrasi. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan jangka panjang antar tiga variabel tersebut. Dari hasil kointegrasi di atas, maka model jangka panjangnya adalah sebagai berikut:

$$IPM_t = \beta_0 + \beta_1 PDB_t + \beta_2 PPN_t + \varepsilon_t$$

Keterangan:

- IPM* = Indeks Pembangunan Manusia
- PDB* = Produk Domestik Bruto
- PPN* = Pajak Pendapatan
- ε = Variabel error

Tabel 4. Model Jangka Panjang dengan Variabel Dependen *IPM*

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	0,2722120	2,601603	0,0180
<i>PDB</i>	0,0000003	3,564863	0,0022
<i>PPN</i>	-0,0000007	-2,603195	0,0180

Dari hasil regresi ditemukan bahwa semua variabel secara signifikan mempengaruhi *IPM* (Tabel 4). Seperti diharapkan, *PDB*

berpengaruh positif terhadap *IPM*, karena peningkatan *PDB* akan memperbaiki kesejahteraan penduduk. Seperti diharapkan juga, *PPN* berpengaruh negatif terhadap *IPM* karena peningkatan pajak pemerintah mengurangi *disposable income*, sehingga menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Dari kondisi di atas, kemudian dibangun model koreksi kesalahan (ECM). Untuk mengantisipasi potensi pengaruh dari tiga peristiwa besar yang terjadi dalam rentang waktu data analisis, dimasukkan tiga buah variabel dummy, yakni *DD* untuk mengakomodasi potensi pengaruh desentralisasi pemerintahan yang diundangkan tahun 1999, *DK1* untuk mengakomodasi potensi pengaruh krisis ekonomi tahun 1997, dan *DK2* untuk mengakomodasi potensi pengaruh krisis ekonomi tahun 2008. Dengan demikian, model yang dibangun adalah:

$$DIPM_t = \theta_0 + \theta_1 DPDB_t + \theta_2 DPPN_t + \theta_3 DD_t + \theta_4 DK1_t + \theta_5 DK2_t + \theta_6 \varepsilon_{t-1} + u_t$$

Keterangan: ε_{t-1} merupakan residual lag 1 dari Persamaan (2), yang merupakan error keseimbangan.

Tabel 5. Model ECM dengan Variabel Dependen *DIPM*

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	0,011073	0,644455	0,5305
DPDB	1,28E-07	2,302560	0,0385
DPPN	-8,29E-07	-1,873606	0,0836
DD	0,021556	1,240155	0,2368
DK1	-0,017558	-0,577827	0,5733
DK2	-0,073179	-3,232442	0,0065
RES1	-0,561677	-1,856101	0,0862

Hasil pengujian model ECM menunjukkan bahwa RES1 (*error correction term*) terlihat signifikan meskipun pada tingkat 10%

saja (Tabel 5). *PDB* dan *PPN* mempengaruhi *IPM* dalam jangka pendek (selain juga pengaruh jangka panjang seperti terlihat di Tabel 4). Terlihat juga bahwa *DD* dan *DK1* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *IPM*. Tentang pengaruh *DD* terhadap *IPM*, hal ini membenarkan keraguan sebagian ahli ekonomi bahwa diperlukan waktu panjang sebelum Pemerintah Daerah mampu menggunakan dengan efisien dan efektif statusnya sebagai daerah otonom (Brojonegoro, 2007). Krisis tahun 1997 tampak tidak berpengaruh terhadap *IPM*, sementara krisis tahun 2008 secara signifikan berpengaruh terhadap *IPM*.

Penelitian ini juga melakukan pengujian dua asumsi klasik yang paling penting dalam pembangunan model, yakni uji homoskedastisitas dan uji *no-autocorrelation*. Heteroskedastisitas, atau pelanggaran atas asumsi homoskedastisitas, muncul apabila residual dari model yang diamati tidak memiliki variasi yang konstan. Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan uji White. Hasil pengujian menunjukkan bahwa probabilitas chi-square adalah 0.114858 yang jauh lebih besar dari 0.05. Dengan demikian kita tidak bisa menolak H_0 bahwa model yang dibangun tidak mengandung heteroskedastisitas.

Untuk menguji keberadaan *autocorrelation*, paper ini menggunakan uji Breusch-Godfrey *Serial Correlation LM test*. Hasil uji menunjukkan bahwa probabilitas nilai chi-square adalah 0,071719 lebih besar dari 0,05, sehingga kita tidak bisa menolak H_0 bahwa tidak ada *autocorrelation* dalam model yang dibangun.

Untuk meyakinkan bahwa proses uji hipotesis adalah benar, perlu diselidiki asumsi normalitas dalam residual. Probabilitas nilai Jarque-Bera adalah 0,758473, sehingga kita tidak bisa menolak H_0 bahwa residual dalam model ECM berdistribusi normal.

SIMPULAN

Penelitian menemukan bahwa *PDB* dan *PPN* secara signifikan mempengaruhi *IPM*. Hasil estimasi model ECM menunjukkan bahwa *PDB*, *PPN*, dan krisis ekonomi tahun 2008 mempengaruhi *IPM*, meskipun *PPN* hanya mempengaruhi dengan tingkat signifikansi 10%. Seperti diharapkan, *PDB* berpengaruh positif terhadap *IPM*, karena peningkatan *PDB* akan memperbaiki kesejahteraan penduduk. Seperti diharapkan juga, *PPN* berpengaruh negatif terhadap *IPM* karena peningkatan pajak pemerintah mengurangi *disposable income*, sehingga menurunkan kesejahteraan masyarakat. *DD* tidak berpengaruh secara positif terhadap *IPM* yang berarti bahwa desentralisasi pemerintahan belum mampu diterjemahkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil di atas, terutama menyangkut desentralisasi yang pemerintahan dan krisis ekonomi tahun 1997, yang tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia barang kali merupakan masalah yang bisa dipecahkan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Paling tidak dua kemungkinan yang terjadi adalah pemodelan yang masih belum sempurna, atau penjelasan yang lebih tepat tentang tidak terpengaruhnya indeks pembangunan manusia tersebut. Barang kali

dengan melakukan penelitian per daerah (misalnya tingkat provinsi atau kabupaten), pengaruh dua variabel tersebut akan signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., Aten, R.H. & Bahl, R. (2001) "Can Indonesia Decentralise Successfully? Plans, Problems and Prospects". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37(1), 83-1-2.
- Davoodi, H. & Zou, H.F. (1998) "Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study". *Journal of Urban Economics*, 43, 244-257.
- Mello, De L.R. (2000) "Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relations: A Cross-Country Analysis," *World Development*, 28(2), 365-380.
- Devas, N. & Grant, U. (2003) "Local Government Decision-Making-Citizen Participation and Local Accountability: Some Evidence from Kenya and Uganda". *Public Administration and Development*, 23, 307-16.
- BPS (berbagai tahun) *Perkembangan Beberapa Indikator Sosial Ekonomi Indonesia*, Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia.
- Brassard, C. (2008) "Decentralization, Democratization and Development in Bhutan" *Working Paper*, February, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.
- Brata, A.G. (2005) *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian-Universitas Atma Jaya.
- Brojonegoro, B.P.S. (2007) "Mampukah Daerah Mengatasi Permasalahan Ekonomi Nasional". *Practical Journal for Management Issues*. Diunduh dari <http://www.managementfile.com> Rabu, 28 Februari 2007.

- Dickey, D.A. & Fuller, W.A. (1979) "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root". *Journal of the American Statistical Association*, 74, 427–431.
- Estache, A. & Sinha, S. (1995) "Does Decentralization Increase Public Expenditure in Infrastructure?" *Policy Research Working Paper 1457*, World Bank.
- Fisman, R. & Gatti, R. (2002) "Decentralization and Corruption: Evidence across Countries". *Journal of Public Economics*, 83, 325–345.
- Ginting, C.K. (2008) "Analisis Pembangunan Manusia di Indonesia". *Tesis Master*, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Haq, M.U. (1996), *Reflections on Human Development, 1st Edition*. New York: Oxford University Press.
- Martinez-Vazquez, J. & McNab, R.M. (2003) "Fiscal Decentralization and Economic Growth," *World Development*, 31(9), 1597–616.
- Morris, M.D. (1979) *Measuring the Condition of the World's Poor: The Physical Quality of Life Index*. London: Frank Cass.
- Nuraini, I. (2005) *Pengantar Ekonomi Mikro*, Malang: Penerbit UMM.
- Patta, D. (2012) "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2010-2011". *Tesis Master*. Universitas Hasanudin.
- Phillips, P.C.B & Perron, P. (1988) "Testing for a Unit Root in Time Series Regression". *Biometrika*, 75, 335–346.
- Rondinelli, D.A. & Cheema, G.S. (1983) "Implementing Decentralization Policies: An Introduction," in *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, edited by G.S. Cheema & Rondinelli, D.A., Beverly Hills, California, Sage.
- Scott, T. (2006) *Decentralization and Human Development: Findings and Recommendations from a Review of National Human Development Reports*. United Nations Development Programme, National Human Development Report Unit, Bureau for Development Policy.
- Setiyono, B. (2004) *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*, Semarang: Puskodak Fisip Undip.
- Syaukani, A.G. & Rasyid, R. (2001), *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.
- United Nations Development Programme (1995) *Human Development Report 1995*, Published for United Nations Development Programme. New York: Oxford University Press.
- United Nations Development Programme (1996), *Human Development Report 1996, Economic and Human Development*, Published for United Nations Development Programme. New York: Oxford University Press.